

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA

Tahun 2016



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

BAB I

PENDAHULUAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	1
B. RANTAI NILAI	3
C. ASPIRASI STAKEHOLDERS	4
BAB II SASARAN DAN INDIKATOR	8
LAMPIRAN :	
TABEL KINERJA PROGRAM	11
TABEL	
MATRIK SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	12
MATRIK BASELINE, TARGET DAN ANGGARAN DITJEN PHLHK	35
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ELEMEN KEGIATAN	34
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN ELEMEN KEGIATAN	40

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2016, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2016 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan dan masyarakat luas.

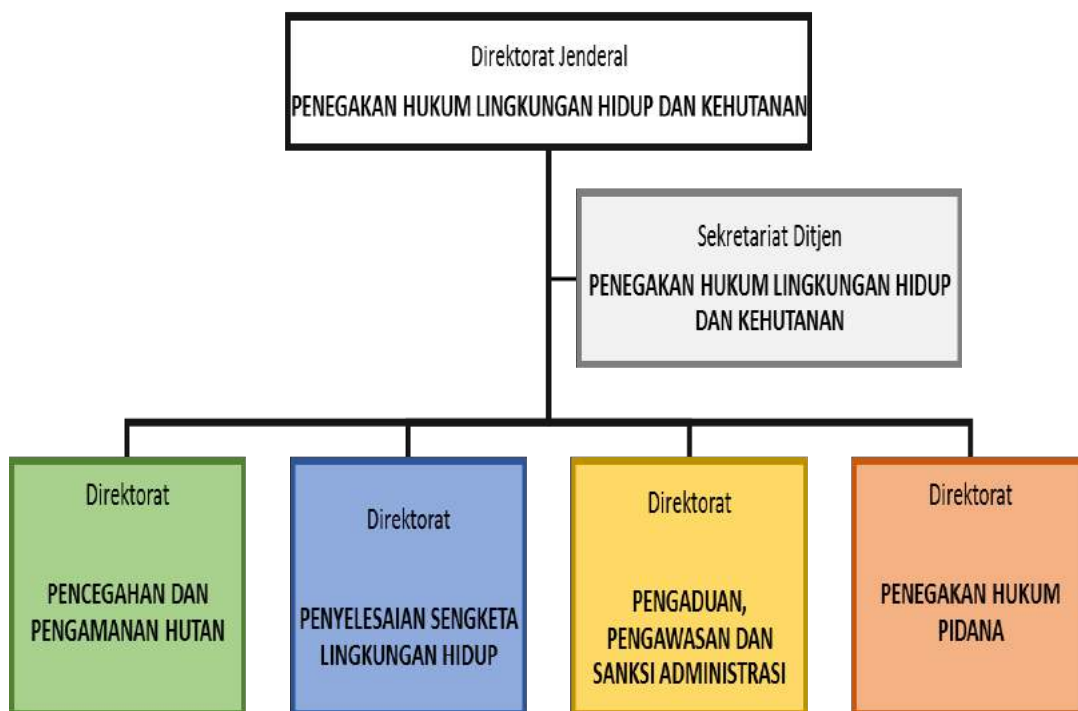
Jakarta, Juni 2016

Direktur Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB I PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Setelah bergabungnya dua Kementerian antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutan terdiri atas Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK dan empat Direktorat, yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi, dan Direktorat Penegakan Hukum Pidana



Gambar I.2 – Struktur Organisasi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Adapun tugas Ditjen PHLHK adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman

dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.¹ Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen PHLHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut² :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

¹ Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1108 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

² Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1109 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.18/MENLH-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.

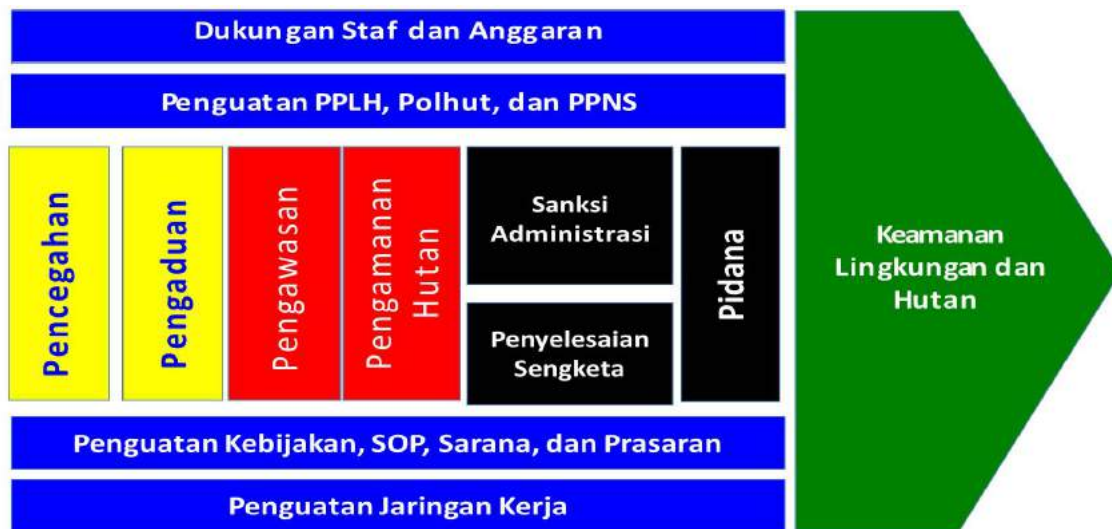
B. Rantai Nilai

Pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK termaksud di atas mesti mengarah pada arah tujuan Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan pada diagram Rantai Nilai Kementerian LHK.



Gambar I.3 - Rantai nilai Kementerian LHK

Pemodelan logis tentang kontribusi Ditjen PHLHK pada pencapaian sasaran strategis kementerian LH ditunjukkan dengan diagram pada Gambar I.4



Gambar I.4 - Rantai nilai Ditjen Penegakan Hukum LHK

C. Aspirasi Stakeholders

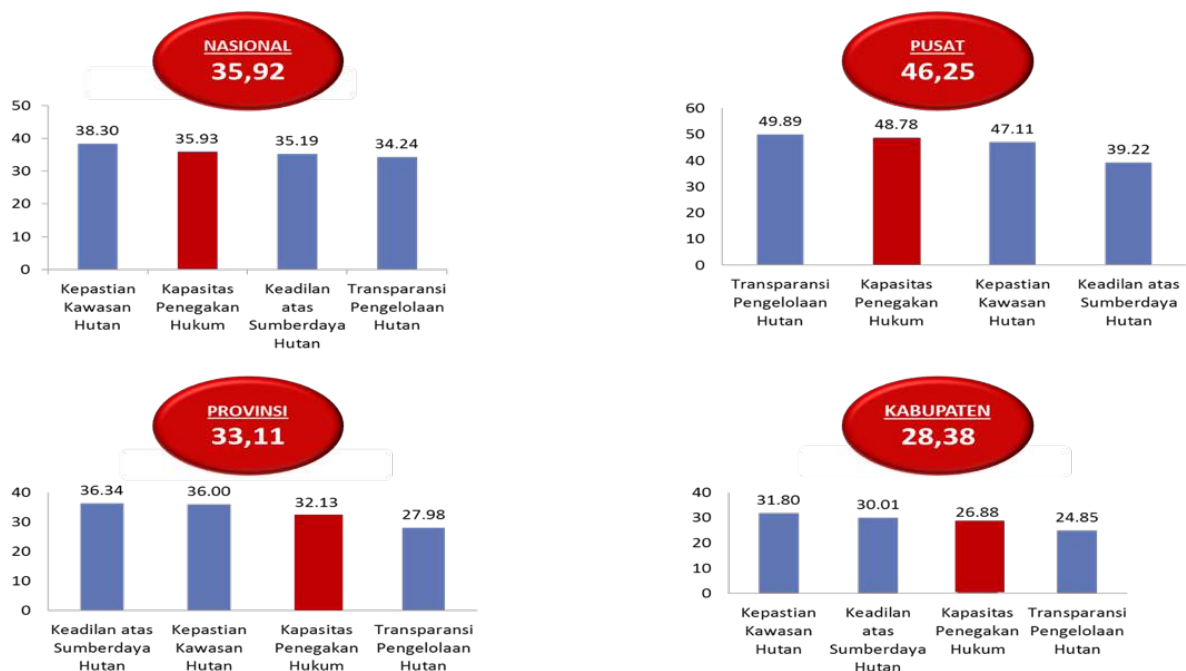
Berikut adalah beberapa masukan dari hasil penggalangan aspirasi stakeholder tersebut untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan :

1. Ada tiga prioritas yang tercermin dalam visi dan misi Joko Widodo – Jusuf Kalla, yaitu : tata kelola, akses informasi, dan keadilan yang menjadikan pentingnya prioritas penegakan hukum. Pemerintah harus memberikan akses yang besar bagi masyarakat. Artinya, informasi perizinan tidak boleh lagi menjadi *domain* yang tertutup dari masyarakat. Yang pada akhirnya masyarakat dapat ikut serta mengawasi untuk membantu pemerintah. Kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat eksekutif, namun juga harus bersifat yudikatif dan perlunya independensi yang kuat antara pelaksanaan dan pengendalian. Monitoring dan evaluasi izin-izin usaha dan kasus kejahatan lingkungan harus lebih ditingkatkan kinerjanya.

2. Dalam melaksanakan mekanisme penegakan hukum, ada tiga hal yang menjadi pilar utama yaitu sebagai pembuat kebijakan, sebagai pelaku kebijakan, dan penegakan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus didukung UU No. 32 Tahun 2009 terutama untuk pasal-pasal terkait penegakan hukum dan kemampuan untuk meyakinkan kementerian lain akan pentingnya pertimbangan UU No. 32 Tahun 2009. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu *strong leadership*, *sustainable development*, dan manajemen yang solid. *Strong leadership* diperlukan untuk mendorong sektor dalam melindungi lingkungan.
3. Penegakan perangkat legal dan regulasi harus tetap dilaksanakan karena hutan dan lahan tidak hanya perlu dijaga tetapi juga dimanfaatkan. Perlu adanya lebih kejelasan tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan karena kawasan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak
4. Penggabungan dua kementerian ini membutuhkan perubahan cara kerja dan koordinasi hingga ke daerah agar tidak terjadi saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan sebaliknya. Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara pusat dan daerah harus benar-benar selaras. Jalin menjalin sehingga alam yang kita miliki sekarang adil dari sabang sampai merauke dan antara generasi
5. Kebakaran hutan yang terjadi secara besar-besaran di pulau Sumatera dan Kalimantan sangat merugikan dan mengganggu tata kehidupan. Pemerintah harus bekerja di luar aturan atau bahkan melanggar aturan demi kepentingan yang lebih besar. Pada kasus lain, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang terus meningkat juga menjadi perhatian yang besar. Salah satu solusi dari masalah kelangkaan tersebut adalah harus dilestarikannya habitat

mereka. Pelaksanaan di lapangan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat harus lebih ditegakkan untuk mengurangi angka kejahatan terhadap spesies langka yang dimiliki oleh Indonesia.

Disamping diskusi antar lembaga, Pada tahun 2014 telah dipublikasikan *Indonesia Forest Governance Index* di mana kapasitas Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek yang dijadikan bahan penilaian. Hasil pencapaian Kapasitas Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:



Gambar I.5 – Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia (UNDP, 2014)

Hasil Aspek Kapasitas Penegakan Hukum di Kabupaten mendapatkan nilai terendah diantara capaian nasional, pusat, dan provinsi yaitu 28.38. Sedangkan di level Nasional dan Pusat, kapasitas penegakan hukum mendapatkan nilai secara berturut-turut 35.92 dan 46.25. Angka ini menggambarkan perlunya kerja keras pemerintah baik pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan kinerja penegakan hukum untuk pengelolaan hutan. Meskipun ada peningkatan hasil nilai dibandingkan dengan hasil indeks pada tahun 2012, indeks tahun 2014 menggambarkan masih ada beberapa tantangan utama dalam kerangka penegakan hukum khususnya pada tingkat provinsi dan kabupaten yang harus diselesaikan demi meningkatnya kapasitas penegakan

hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini. Tantangan utama dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum kedepan adalah sebagai berikut :

- Mekanisme Penanganan Pengaduan di bidang kehutanan dan lahan yang mengintegrasikan perlindungan *whistle blower*
- Mekanisme sistem pengawasan terhadap penataan perizinan hutan dan lahan yang memanfaatkan kemampuan kontrol publik dan pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

Peningkatan upaya penegakan hukum sendiri sudah mulai dilakukan melalui *multidoors approach*. Penerapan *multidoors approach* ini memiliki dua macam tingkat, yaitu tingkat gerakan dan tingkat lapangan. Pada tingkat gerakan, CSO yang mempunyai kegiatan untuk melakukan advokasi dan pencegahan korupsi sekitar 30% dari jumlah CSO yang ada. Sedangkan pada tingkat lapangan, jumlah penyidik yang telah dilatih untuk mengikuti pelaksanaan pendekatan *multidoors* kurang dari 10%.

Tata Kelola Hutan di Indonesia selama ini dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal. Tercatat data kerugian negara sebaga berikut:

- 35,7 Juta Ha Non-Hutan yang butuh restorasi (IDR 28 Juta / Ha).
- Kerugian karena Illegal Logging & Missmanagement sekitar IDR 91 Trilyun.
- Kerugian karena Kebakaran Hutan IDR Trilyun-an.
- Kerugian karena banjir dan tanah longsor IDR 210 Milyar.
- Kerugian pelaku usaha-ekonomi biaya tinggi (30% dari biaya produksi) sehingga tidak kompetitif .
- Meningkatnya laju deforestasi yang pesat.
- Konflik: hilangnya rasa aman, berkurangnya kesempatan mencari penghidupan, dan kekerasan fisik.

BAB II

SASARAN DAN INDIKATOR

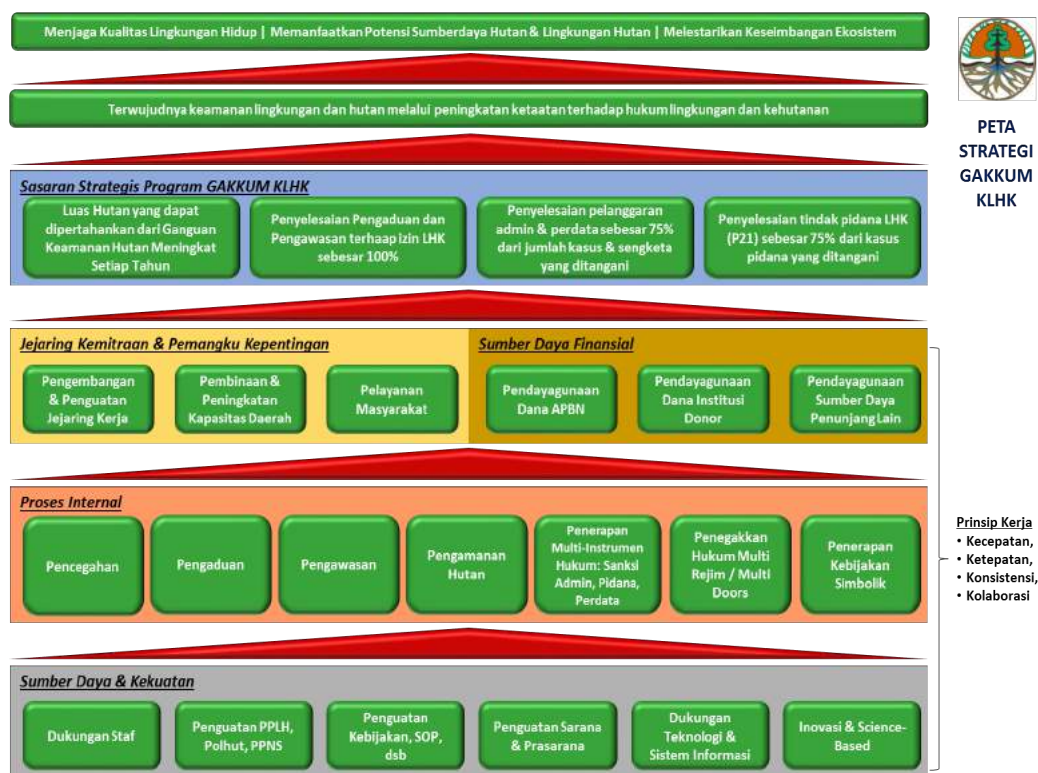


**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

BAB II SASARAN DAN INDIKATOR

2.1 PETA STRATEGI

Perumusan program, sasaran, kegiatan, serta identifikasi potensi dan permasalahan yang datang dari internal maupun eksternal, menghasilkan sebuah peta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas yang diemban selama periode 2015-2019. Strategi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari setiap bagian Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Peta Strategi yang akan dijadikan acuan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan fungsinya, digambarkan pada Gambar II.2.



Gambar II.21 – Peta Strategi Ditjen Penegakan Hukum LHK

Ditjen Penegakan Hukum LHK mengembangkan suatu Peta Strategi sebagai suatu rencana gerak langkah pencapaian sasaran, perwujudan target, serta pendayagunaan sumber-sumber daya.

Peta Strategi terdiri dari 5 perspektif, yaitu: Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan, Perspektif Proses Internal, Perspektif Jejaring Kemitraan dan Pemangku Kepentingan, Perspektif Sumber Daya Finansial, Perspektif Sasaran Strategis Program Penegakan Hukum Kementerian LHK. Dalam tiap perspektif terdapat tujuan dan proses kunci. Tujuan dan proses kunci ini mencerminkan pihak-pihak, unit-unit, dan/atau langkah-langkah yang diperlukan, sebagai elemen-elemen strategis.

Perspektif Sumber Daya dan Kekuatan merupakan modal, *enabler*, penunjang, untuk Ditjen Penegakan Hukum LHK menjalankan proses-proses internalnya. Melalui proses-proses internal tersebut, diarahkan agar Jejaring Kemitraan dapat dikembangkan dan dimobilisasi, serta agar Pemangku Kepentingan dapat dilayani dengan efektif serta disinergikan. Selain itu, dengan memanfaatkan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui proses-proses internal, Ditjen Pnegakan Hukum LHK diarahkan untuk mendayagunakan sumber-sumber daya finansial yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai program, kegiatan, serta mengisi kekurangan yang telah diprioritaskan.

Dengan Sumber Daya dan Kekuatan, melalui Proses-proses Internal, serta bersama Jejaring Kemitraan, Pemangku Kepentingan, dan pendayagunaan secara efektif sumber-sumber daya finansial, maka Ditjen PHLHK akan mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang diembannya, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan keamanan lingkungan dan hutan, sebagai bagian penting dari amanat yang diemban KLHK.

Peta Strategi digunakan, karena dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, diperlukan gerak langkah, arah dan sumber daya yang terpadu serta jelas keterkaitan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Peta Strategi ini, kemudian sasaran dan target untuk tiap Unit Kegiatan, dikembangkan, dipadukan dan diselaraskan. Hal ini diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

Pentingnya penggunaan Peta Strategi adalah karena sifatnya yang komprehensif, yaitu mempertimbangkan berbagai perspektif sekaligus

juga menyelaraskan satu perspektif dengan yang lainnya, dan memadukan keterkaitan antara satu tujuan dan proses dengan yang lainnya

2.2 PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan

kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan Penegakan Hukum yang akan digunakan antara lain: Peningkatan kapasitas penegakan hukum, Penerapan Multi Instrumen Hukum, Penerapan Multi Rejim Hukum (*Multidoors*), dan Penerapan Kebijakan Simbolik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Program dan Kinerja 2016 :

**1. Matriks Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja
Program (IKP)**

Tabel Kinerja Program

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat (S1)	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum (S1.P7)	Presentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun (S1.P7.IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7)	Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun (S3.P7.IKP)

2. Matrik Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Tabel Kinerja Kegiatan

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (P7)		
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (K1)		
Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum (S1.P7)	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.K1)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (S1.P7.K1.IKK.a)
		Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan/atau izin-izin serta PUU terkait LHK sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLHK (S1.P7.K1.IKK.b)
		Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun (S1.P7.K1.IKK.c)
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P7.K1.IKK.d)
		Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P7.K1.IKK.e)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) (K2)		
	Meningkatnya efektivitas PSLH (S1.P7.K2)	Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)
		Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)
Penegakan Hukum Pidana (K3)		
	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3)	Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)
		Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)
		Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)
		Persentase pelaksanaan eksaminasi kasus Tindak Pidana

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		LHK sebanyak 100 % (S1.P7.K3.IKK.d)
		Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu
		sebanyak 30 kasus per tahun (S1.P7.K3.IKK.e)
		Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)
		Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)
		Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.h)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K5)		
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P7.K5.IKK.a)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Penegakan Hukum (P7)		
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4)		
Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum (S3.P7)	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi (S3.P7.K4)	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi (S3.P7.K4.IKK.a)
		Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)
		Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.c)
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.d)

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)

3. Matriks Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan

Tabel Kinerja Unit Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (P7)		
Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (K1)		
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.K1)	Penanganan Pengaduan (UK1)	
	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat (S1.P7.K1.UK1)	Jumlah kebijakan terkait pengaduan tersedia (S1.P7.K1.UK1.U11)
		Persentase penerapan sistem pengaduan (S1.P7.K1.UK1.U12)
		Jumlah pelaksanaan penanganan pengaduan LHK (S1.P7.K1.UK1.U13)
		Jumlah pembinaan dan sosialisasi yang telah dilakukan (S1.P7.K1.UK1.U14)
		Jumlah sarana dan prasarana verifikasi tersedia (S1.P7.K1.UK1.U15)
		Jumlah sarana dan prasarana verifikasi terpelihara (S1.P7.K1.UK1.U16)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Pengawasan Penaatan (UK2)	
	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh KLH (S1.P7.K1.UK2.1)	Jumlah kebijakan terkait pengawasan tersedia (S1.P7.K1.UK2.1.UI1)
		Persentase pelaksanaan pengawasan izin (S1.P7.K1.UK2.1.UI2)
		Jumlah kegiatan sosialisasi terhadap pemilik izin yang telah dilakukan (S1.P7.K1.UK2.1.UI3)
	Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) (S1.P7.K1.UK2.2)	Jumlah PPLH yang dilatih dan/atau dibina (S1.P7.K1.UK2.2.UI1)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S1.P7.K1.UK2.3)	Jumlah sarana dan prasarana PPLH tersedia (S1.P7.K1.UK2.3.UI1)
		Jumlah sarana dan prasarana PPLH terpelihara (S1.P7.K1.UK2.3.UI2)
	Penarapan Sanksi Administrasi (UK3)	
	Meningkatnya sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan (S1.P7.K1.UK3)	Jumlah kebijakan terkait Sanksi Administrasi tersedia (S1.P7.K1.UK3.UI1)
		Jumlah penerapan Sanksi Administrasi (S1.P7.K1.UK3.UI2)
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan taat terhadap		

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Sanksi Administrasi (S1.P7.K1.UK3.UI3)
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2)		
Meningkatnya efektivitas PSLH (S1.P7.K2)	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam (UK1)	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (S1.P7.K2.UK1)	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang masuk dan direkomendasi PSLH diluar pengadilan (S1.P7.K2.UK1.UI1)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diverifikasi (S1.P7.K2.UK1.UI2)
		Jumlah sengketa Lingkungan Hidup yang dihitung kerugian lingkungan dan atau masyarakat (S1.P7.K2.UK1.UI3)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diklarifikasi (S1.P7.K2.UK1.UI4)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang di selesaikan diluar pengadilan (negosiasi, mediasi dan/atau fasilitasi.) (S1.P7.K2.UK1.UI5)
		Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan kriteria yang disusun (S1.P7.K2.UK1.U16)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang di evaluasi

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		penyelesaian sengketa LH di luar Pengadilan (S1.P7.K2.UK1.UI7)
		Jumlah negosiator, fasilitator dan/atau mediator yang ditingkatkan kapasitasnya. (S1.P7.K2.UK1.UI8)
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Bidang Industri, Rasarana, dan Jasa (UK2)	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (S1.P7.K2.UK2)	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang masuk dan direkomendasi PSLH diluar pengadilan (S1.P7.K2.UK2.UI1)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diverifikasi (S1.P7.K2.UK2.UI2)
		Jumlah sengketa LH yang dihitung kerugian lingkungan dan atau masyarakat (S1.P7.K2.UK2.UI3)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diklarifikasi (S1.P7.K2.UK2.UI4)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang di selesaikan diluar pengadilan (negosiasi, mediasi dan/atau fasilitasi.) (S1.P7.K2.UK2.UI5)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PSLH yang disusun (S1.P7.K2.UK2.U16)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang di evaluasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan (S1.P7.K2.UK2.U17)
		Jumlah negosiator, fasilitator dan/atau mediator yang ditingkatkan kapasitasnya. (S1.P7.K2.UK2.U18)
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (UK3)	
	Meningkatnya gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar melalui pengadilan (S1.P7.K2.UK3)	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang masuk dan direkomendasi PSLH melalui pengadilan (S1.P7.K2.UK3.U11)
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diverifikasi (S1.P7.K2.UK3.U12)
		Jumlah penghitungan kerugian lingkungan (S1.P7.K2.UK3.U13)
		Jumlah penyusunan gugatan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (S1.P7.K2.UK3.U14)
		Jumlah gugatan sengketa lingkungan hidup yang

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		<p>didaftarkan melalui pengadilan (S1.P7.K2.UK3.UI5)</p> <p>Jumlah putusan pengadilan (S1.P7.K2.UK3.UI6)</p>
		<p>Jumlah penyusunan dan pendaftaran upaya banding, Kasasi dan PK (S1.P7.K2.UK3.UI7)</p> <p>Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PSLH yang disusun (S1.P7.K2.UK3.U18)</p> <p>Jumlah putusan sengketa LH melalui pengadilan yang di evaluasi (S1.P7.K2.UK3.UI9)</p> <p>Jumlah penerima kuasa, saksi ahli, dan/atau hakim yang dikuatkan. (S1.P7.K2.UK3.UI10)</p>
Penegakan Hukum Pidana (K3)		
Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3)	Penyidikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan, Dan Lahan (UK1)	
	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 (S1.P7.K3.UK1.1)	<p>Jumlah kebijakan terkait penyelesaian tindak pidana P21 (S1.P7.K3.UK1.1.UI1)</p> <p>Jumlah pelaksanaan penyidikan (S1.P7.K3.UK1.1.UI2)</p>
	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK1.2)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan (S1.P7.K3.UK1.2.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.UK1.3)	Jumlah pelaksanaan penanganan barang bukti (S1.P7.K3.UK1.3.UI1)
	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH (S1.P7.K3.UK1.4)	Jumlah pelaksanaan eksaminasi putusan pengadilan (S1.P7.K3.UK1.4.UI1)
		Jumlah publikasi hasil eksaminasi (S1.P7.K3.UK1.4.UI2)
	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor (S1.P7.K3.UK1.5)	Jumlah fasilitasi penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK1.5.UI1)
	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K3.UK1.6)	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (S1.P7.K3.UK1.6.UI1)
	Penyidikan Perambahan Hutan (UK2)	
	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 (S1.P7.K3.UK2.1)	Jumlah kebijakan terkait penyelesaian tindak pidana P21 (S1.P7.K3.UK2.1.UI1)
		Jumlah pelaksanaan penyidikan (S1.P7.K3.UK2.1.UI2)
	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK2.2)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan (S1.P7.K3.UK2.2.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.UK2.3)	Jumlah pelaksanaan penanganan barang bukti (S1.P7.K3.UK2.3.UI1)
	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH (S1.P7.K3.UK2.4)	Jumlah pelaksanaan eksaminasi putusan pengadilan (S1.P7.K3.UK2.4.UI1)
		Jumlah publikasi hasil eksaminasi (S1.P7.K3.UK2.4.UI2)
	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor (S1.P7.K3.UK2.5)	Jumlah fasilitasi penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK2.5.UI1)
	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K3.UK2.6)	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (S1.P7.K3.UK2.6.UI1)
	Penyidikan Pembalakan Liar Dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati (UK3)	
	Meningkatnya penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 (S1.P7.K3.UK3.1)	Jumlah kebijakan terkait penyelesaian tindak pidana P21 (S1.P7.K3.UK3.1.UI1)
		Jumlah pelaksanaan penyidikan (S1.P7.K3.UK3.1.UI2)
	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK3.2)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan (S1.P7.K3.UK3.2.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.UK3.3)	Jumlah pelaksanaan penanganan barang bukti (S1.P7.K3.UK3.3.UI1)
	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH (S1.P7.K3.UK3.4)	Jumlah pelaksanaan eksaminasi putusan pengadilan (S1.P7.K3.UK3.4.UI1)
		Jumlah publikasi hasil eksaminasi (S1.P7.K3.UK3.4.UI2)
	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor (S1.P7.K3.UK3.5)	Jumlah fasilitasi penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK3.5.UI1)
	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K3.UK3.6)	Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (S1.P7.K3.UK4.4.UI1)
Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup (UK4)		
	Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana sampai dengan P-21 (S1.P7.K3.UK4.1)	Jumlah kebijakan terkait penyelesaian perkara tindak pidana sampai dengan P-21 (S1.P7.K3.UK4.1.UI1)
		Jumlah pelaksanaan penyidikan (S1.P7.K3.UK4.1.UI2)
	Meningkatnya jumlah verifikasi perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK4.2)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan (S1.P7.K3.UK4.2.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.UK4.3)	Jumlah pelaksanaan penanganan barang bukti (S1.P7.K3.UK4.3.UI1)
	Meningkatnya pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH (S1.P7.K3.UK4.4)	Jumlah pelaksanaan eksaminasi putusan pengadilan (S1.P7.K3.UK4.4.UI1)
		Jumlah publikasi hasil eksaminasi (S1.P7.K3.UK4.4.UI2)
	Meningkatnya penanganan kasus pidana dalam rangka penyelesaian kasus multidoor (S1.P7.K3.UK4.5)	Jumlah fasilitasi penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3.UK4.5.UI1)
	Meningkatnya kapasitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K3.UK4.6)	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (S1.P7.K3.UK4.6.UI1)
	Menurunnya kasus penyelundupan limbah B3 dan Kimbah B3 ilegal lintas batas (S1.P7.K3.UK4.7)	Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan Kimbah B3 ilegal lintas batas (S1.P7.K3.UK4.7.UI1)
	Menurunnya kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut (S1.P7.K3.UK4.8)	Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut (S1.P7.K3.UK4.8.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K5)		
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	Program dan Evaluasi (UK1)	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK (S1.P7.K5.UK1.1)	Jumlah capaian sasaran indikator program dan indikator kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.UI1)
		Nilai SAKIP Dirjen PHLHK (S1.P7.K5.UK1.1.UI2)
		Jumlah satker yang terselenggara program dan kegiatan (S1.P7.K5.UK1.1.UI3)
	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.2)	Jumlah berita media mengenai Kegiatan Penegakan Hukum LHK kepada masyarakat (S1.P7.K5.UK1.2.UI1)
		Jumlah kampanye/pameran PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial (S1.P7.K5.UK1.2.UI2)
	Tercapainya data dan Informasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5.UK1.3)	Jumlah satker yang memiliki sistem informasi berfungsi memenuhi standar minimal setiap tahun (S1.P7.K5.UK1.3.UI1)
		Jumlah Publikasi penegakan Hukum LHK (S1.P7.K5.UK1.3.UI2)
		Tersedianya bahan kerja pimpinan PHLHK (S1.P7.K5.UK1.3.UI3)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (UK2)	
	Meningkatnya daya saing SDM Dirjen Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K5.UK2.1)	Tersedianya Polisi Hutan, PPNS, PPLH dalam mendukung PHLHK dan SDM PHLHK kompeten (S1.P7.K5.UK2.1.UI1)
		Jumlah PPLH memenuhi kebutuhan untuk pengawasan (S1.P7.K5.UK2.1.UI2)
		Jumlah PPNS memenuhi kebutuhan untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum (S1.P7.K5.UK2.1.UI3)
		Jumlah SDM PHLHK yang meningkat kompetensinya (S1.P7.K5.UK2.1.UI4)
	Tersusunnya Struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2)	Jumlah UPT penegakan hukum yang efektif dan efisien (S1.P7.K5.UK2.2.UI1)
	Keuangan dan Umum (UK3)	
	Meningkatnya administrasi keuangan Ditjen PHLHK secara efektif (S1.P7.K5.UK3.1)	Opini WTP untuk laporan keuangan (S1.P7.K5.UK3.1.UI1)
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK (S1.P7.K5.UK3.2)	Jumlah Manajemen Aset (S1.P7.K5.UK3.2.UI1)
		Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi di satker dan berfungsi baik sesuai dengan NSPK (S1.P7.K5.UK3.2.UI2)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Hukum dan Kerja Sama Teknik (UK4)	
	Tersedianya rancangan aturan dan NSPK terkait ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.1)	Jumlah rancangan Kebijakan strategis (S1.P7.K5.UK4.1.UI1) Jumlah NSPK (S1.P7.K5.UK4.1.UI2)
	Tersedianya bantuan hukum Ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2)	Jumlah bantuan hukum ditjen PHLHK (S1.P7.K5.UK4.2.UI1)
	Terselenggarakannya kerjasama teknis dalam meningkatkan efektifitas kegiatan PHLHK (S1.P7.K5.UK4.3)	Jumlah kerjasama teknis dalam negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI1) Jumlah kerjasama teknis luar negeri terkelola (S1.P7.K5.UK4.3.UI2)
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (P7)		
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4)		
Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi (S3.P7.K4)	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sumatera	
	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan (S3.P7.K4.UK1.1)	Jumlah operasi represif perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK1.1.UI1) Jumlah koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK1.1.UI2)
		Jumlah Kegiatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan untuk pencegahan dan pengamanan hutan

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		(S3.P7.K4.UK1.1.UI3)
	Meningkatnya jumlah polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK1.2)	Jumlah polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (S3.P7.K4.UK1.2.UI1)
	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) yang dibina (S3.P7.K4.UK1.3)	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK1.3.UI1) Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya yang dibina (S3.P7.K4.UK1.3.UI2)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan pencegahan hukum (S3.P7.K4.UK1.4)	Jumlah kebijakan terkait sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S3.P7.K4.UK1.4.UI1) Sarana dan prasarna PPH yang tersedia (S3.P7.K4.UK1.4.UI2) Sarana dan prasarana PPH yang terpelihara (S3.P7.K4.UK1.4.UI3)
	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK1.5)	Jumlah kebijakan terkait perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK1.5.UI1) Jumlah data atau informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK1.5.UI2) Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		keamanan hutan (S3.P7.K4.UK1.5.UI3)
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Kalimantan Dan Nusa Tenggara (UK2)	
	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan (S3.P7.K4.UK2.1)	Jumlah operasi represif perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK2.1.UI1)
		Jumlah koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.1.UI2)
		Jumlah Kegiatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan untuk pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.1.UI3)
	Meningkatnya jumlah polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK2.2)	Jumlah polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (S3.P7.K4.UK2.2.UI1)
	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) yang dibina (S3.P7.K4.UK2.3)	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK2.3.UI1)
		Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya yang dibina (S3.P7.K4.UK2.3.UI2)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan pencegahan hukum (S3.P7.K4.UK2.4)	Jumlah kebijakan terkait sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S3.P7.K4.UK2.4.UI1)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Sarana dan prasarna PPH yang tersedia (S3.P7.K4.UK2.4.UI2)
		Sarana dan prasarana PPH yang terpelihara (S3.P7.K4.UK2.4.UI3)
	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK2.5)	Jumlah kebijakan terkait perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK2.5.UI1)
		Jumlah data atau informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.5.UI2)
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.5.UI3)
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Jawa Dan Bali (UK3)	
	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan (S3.P7.K4.UK3.1)	Jumlah operasi represif perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK2.1.UI1)
		Jumlah koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.1.UI2)
		Jumlah Kegiatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan untuk pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK2.1.UI3)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Meningkatnya jumlah polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK3.2)	Jumlah polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (S3.P7.K4.UK3.2.UI1)
	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) yang dibina (S3.P7.K4.UK3.3)	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK3.3.UI1)
		Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya yang dibina (S3.P7.K4.UK3.3.UI2)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan pencegahan hukum (S3.P7.K4.UK3.4)	Jumlah kebijakan terkait sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S3.P7.K4.UK3.4.UI1)
		Sarana dan prasarna PPH yang tersedia (S3.P7.K4.UK3.4.UI2)
		Sarana dan prasarana PPH yang terpelihara (S3.P7.K4.UK3.4.UI3)
	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK3.5)	Jumlah kebijakan terkait perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK3.5.UI1)
		Jumlah data atau informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK3.5.UI2)
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK3.5.UI3)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
	Pencegahan Dan Pengamanan Hutan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (UK4)	
	Meningkatnya jumlah lokasi yang dilaksanakan pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan (S3.P7.K4.UK4.1)	Jumlah operasi represif perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK4.1.UI1)
		Jumlah koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.1.UI2)
		Jumlah Kegiatan pre-emptif dan preventif yang dilakukan untuk pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.1.UI3)
	Meningkatnya jumlah polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK4.2)	Jumlah polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (S3.P7.K4.UK4.2.UI1)
	Meningkatnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) yang dibina (S3.P7.K4.UK4.3)	Jumlah Masyarakat Mitra Polhut yang dibina (S3.P7.K4.UK4.3.UI1)
		Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya yang dibina (S3.P7.K4.UK4.3.UI2)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, dan pencegahan hukum (S3.P7.K4.UK4.4)	Jumlah kebijakan terkait sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum (S3.P7.K4.UK4.4.UI1)
		Sarana dan prasarna PPH yang tersedia (S3.P7.K4.UK4.4.UI2)

SASARAN KEGIATAN	SASARAN UNIT KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UNIT KEGIATAN
		Sarana dan prasarana PPH yang terpelihara (S3.P7.K4.UK4.4.UI3)
	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK4.5)	Jumlah kebijakan terkait perlindungan kawasan hutan dari kegiatan ilegal (S3.P7.K4.UK4.5.UI1)
		Jumlah data atau informasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.5.UI2)
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan keamanan hutan (S3.P7.K4.UK4.5.UI3)

4. Matriks Baseline, Target dan Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp Milyar)	Penanggung Jawab
			2016	2016	2016	
<u>P7:</u> Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan					241.8	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	<u>S1.P7:</u> Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum					
		<u>S1.P7.IKP:</u> Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum meningkat setiap tahun	625	70%		
	<u>S3.P7:</u> Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan					
		<u>S3.P7.IKP:</u> Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun		5,000,000 Ha		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp Milyar)	Penanggung Jawab
			2016	2016	2016	
K1: Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi						
	1. Meningkatnya efektifitas penangan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.				14,90	
		<u>S1.P6.K1.IKK.a:</u> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	500	100%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.b:</u> Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH	500	100%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.c:</u> Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun	75	60%		
		<u>S1.P6.K1.IKK.d:</u> Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun		120 PPLH		
		<u>S1.P6.K1.IKK.e:</u> Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH		100 orang PPLH		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp Milyar)	Penanggung Jawab
			2016	2016	2016	
K2: Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH)					8,88	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya efektivitas PSLH			75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	8,88	
		<u>S1.P7.K2.IKK.a:</u> Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi	15	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi		
		<u>S1.P7.K2.IKK.b:</u> Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun		10 gugatan		
K3: Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan					14.53	Direktorat Penegakan Hukum Pidana
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan			75%	14.53	
		<u>S1.P7.K3.IKK.a:</u> Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus	100	75%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.b:</u> Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun		200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan		
		<u>S1.P7.K3.IKK.c:</u> Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani	168	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp Milyar)	Penanggung Jawab
			2016	2016	2016	
		<u>S1.P7.K3.IKK.d:</u> Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH sebesar 100%	7	100%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.e:</u> Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 100% per tahun	30	100%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.f:</u> Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun	500	500 orang		
		<u>S1.P7.K3.IKK.g:</u> Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75%		20%		
		<u>S1.P7.K3.IKK.h:</u> Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75%		20%		
K4: Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan					14,79	Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	1. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi			77 lokasi	14,79	
		<u>S3.P7.K4.IKK.a:</u> Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas		77 lokasi		
		<u>S3.P7.K4.IKK.b:</u> Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun		2.500 orang		

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target	Rencana Alokasi (Rp Milyar)	Penanggung Jawab
			2016	2016	2016	
		<u>S3.P7.K4.IKK.c:</u> Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun		34 unit MMP/ TPHL /LSM/Mit ra		
		<u>S3.P7.K4.IKK.d:</u> Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC		11 Brigade		
		<u>S3.P7.K4.IKK.e:</u> Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun		5,000,000 Ha		
K5: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan					65,03	Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			72 Poin	11.00	
		<u>S3.P7.K5.IKK.a:</u> SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019		72 Poin		

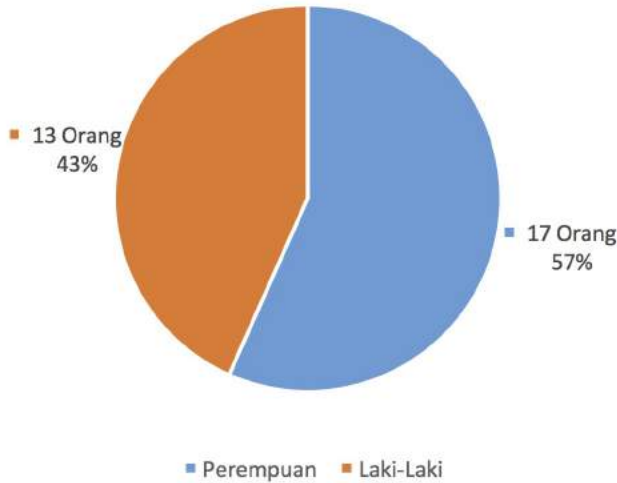
5. TABEL KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

KERANGKA PENDANAAN PROGRAM	
(Rp '000)	
	2016
Program	241,800,000
Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	14.904.624
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	8.885.981
Pencegahan Dan Pengamanan Hutan	14.798.788
Penegakan Hukum Pidana	14.530.760
Unit Pelaksana Teknis BPPH LHK (5 UPT)	123.647.329
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65.032.518

SOSIALISASI & ADVOKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

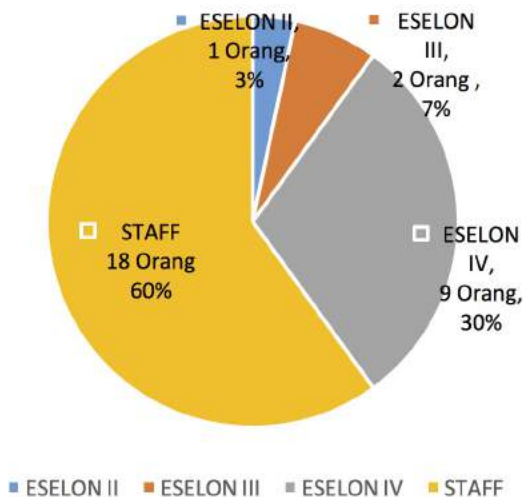


Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi PUG lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PHLHK sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki.

Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mendukung percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Matriks Capaian Kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

No	Kegiatan	Anggaran	Target	Capaian	Tahun 2016
1	Sosialisasi Dan Advokasi Pengarusutamaan Gender lingkup Ditjen PHLHK	Rp. 49.150.000,-	30 Orang	30 Orang	100%



Pada tahun 2016 dengan target sasaran kegiatan sebanyak 30 Orang yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 2 Orang, Eselon IV sebanyak 9 Orang dan Staff sebanyak 18 Orang, serta dengan proporsi sex aggregated data dari seluruh peserta sebanyak 43 persen Laki-laki dan 57 Persen Perempuan.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender di tahun berikutnya diharapkan dapat mencapai Sasaran Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Penutup:

Rencana Kerja 2016 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah di capai di tahun 2015, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2017. Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja. Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2016.



GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LANTAI 4
JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA 10270